

**FLASH BACK KEGIATAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2016**

Bulan Januari 2016

Bupati Launching Website Desa se-Kecamatan Sumberrejo



Bupati Bojonegoro, Jawa Timur, Suyoto, Selasa (12/1), meluncurkan website 26 desa di Kecamatan Sumberrejo, yang diproyeksikan menjadi percontohan website desa untuk mendorong keterbukaan informasi publik.

“Dunia sekarang sudah berubah. Dalam mengembangkan pelayanan kepada masyarakat dilakukan melalui teknologi informasi,” katanya, dalam acara peluncuran website desa di Kecamatan Sumberrejo.

Oleh karena itu, ia mengharapkan website desa harus mengupdate data atau informasi mingguan, bahkan kalau bisa harian.

“Kami minta semua kecamatan di Bojonegoro mencontoh Sumberrejo dalam pengembangan website desa,” harapnya. Ia juga menyatakan bahwa Bojonegoro akan jadi proyek percontohan open data elektronik pemerintahan dunia.

Camat Sumberrejo, Ilham menjelaskan dalam mengembangkan website desa di wilayahnya dilakukan dengan mengalokasikan anggaran melalui APBDes.

“Sudah semua desa (26 desa) di Kecamatan Sumberrejo online,” katanya, menegaskan.

Kepala Dinas Kominfo Bojonegoro menambahkan website desa adalah sebagai sarana keterbukaan informasi publik di pemerintahan desa, nantinya semua informasi bisa diakses melalui web desa. (* /mcb)

Bulan Pebruari 2016

Pemohon Dokumentasi Informasi di Bojonegoro Meningkat



Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, menyebutkan permintaan dokumen informasi terkait kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di jajaran pemkab dari masyarakat dalam dua bulan terakhir mencapai 10 pemohon.

“Permintaan dokumen informasi kinerja SKPD tahun ini, sebagian di antaranya, merupakan pemohon yang mengajukan keberatan, karena permohonannya belum terpenuhi semua,” kata Kepala Dinas Kominfo Bojonegoro Kusnandaka Tjatur di Bojonegoro, Senin.

Ia mencontohkan salah satu pemohon yang belum bisa terpenuhi yaitu dari lembaga swadaya masyarakat (LSM), karena meminta dokumen informasi kontrak kerja berbagai kinerja di SKPD pemkab.

“Dokumen informasi yang diminta ada 34 buku, sehingga kami harus mengumpulkan satu persatu,” jelas dia.

Menurut dia, pemkab, berkewajiban memenuhi permintaan dokumen informasi dari pemohon, bisa dari perseorangan atau LSM, karena merupakan amanat UU No.8 tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Di Bojonegoro, lanjut dia, pelaksanaan UU itu, didukung dengan Peraturan Bupati (Perbup) Bojonegoro No. 40 tahun tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Di dalam perbup itu, lanjut dia, permintaan dokumen informasi yang secara langsung ditangani PPID. Lainnya, lanjut dia, keterbukaan informasi publik, juga bisa melalui dialog Jumat, pesan singkat telepon selular di 1708, halo bupati, dan ke Radio Malowopati, milik pemkab. Jumlah masyarakat yang memanfaatkan berbagai saluran itu, rata-rata ratusan orang, per tahunnya, sejak 2008 lalu.

“Permintaan dokumen informasi bisa saja ditolak, kalau kinerja SKPD yang bersangkutan belum diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” jelas dia.

Di lain pihak, lanjut dia, pemohon juga memiliki hak mengajukan gugatan sengketa informasi publik, kepada Komisi penyiaran Jawa Timur, kalau tidak puas dengan dokumentasi informasi yang diterima.

“Ada kecenderungan permintaan dokumen informasi semakin meningkat, sebab tahun lalu dalam setahun hanya 15 pemohon,” ucapnya.

Sesuai data, lanjut dia, permintaan dokumentasi informasi tahun lalu, antara lain, data realisasi anggaran 2013, data nama lembaga pendidikan SLTA, juga nama sisanya, pada 2015 dan data pemberhentian guru tidak tetap (GTT).

“Permintaah pemohon terkait dokumentasi informasi tahun lalu semuanya bisa terpenuhi,” katanya, menegaskan.

sumber :

antara (<http://www.antarajatim.com/lihat/berita/173109/permintaan-dokumen-informasi-di-bojonegoro-10-pemohon>)

Bulan Maret 2016

PPID Bojonegoro Menyampaikan Laporan Tahunan Ke Komisi Informasi



Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bojonegoro, Kusnandaka Tjatur menyampaikan laporan layanan informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur (KI Jatim) pada Selasa (22/3). Penyampaian laporan tersebut diterima langsung oleh Ketua KI Jatim Ketty Tri Setyorini, Wakil Ketua Zulaikha dan Anggota Isrowi Farida.

Kusnandaka didampingi Djoko menyampaikan Laporan Tahunan Layanan Informasi PPID Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 sebagai amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan SK Bupati Bojonegoro No 54 Tahun 2011 tentang PPID dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang transparan.

Menurut Kusnandaka, Kabupaten Bojonegoro telah memulai keterbukaan informasi sebelum adanya UU KIP. Keterbukaan informasi publik melalui “Sobo Pendopo” dalam bentuk dialog publik telah dilakukan sejak 14 Maret 2008 hingga sekarang. “Mekanisme pemerintah secara dialogis telah menjadi kajian dari berbagai Perguruan Tinggi (PT) dalam dan luar negeri,” kata Kusnandaka yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Kominfo Kab. Bojonegoro.

Pada tahun 2015, Kabupaten Bojonegoro memperoleh penghargaan PPID Terbaik ke-2 tingkat Kabupaten se Jawa Timur dari KI Jatim, setelah Kabupaten Blitar, pada ajang PPID Award 2015.

Karena prestasinya tersebut, masyarakat Bojonegoro dapat berbangga karena pada tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro diikuti kompetisi Open Government Indonesia (OGI).

Mengenai layanan informasi, selama tahun 2015, Kabupaten Bojonegoro telah melayani sejumlah permohonan informasi. Dari permohonan informasi tersebut, 9 (53%) pemohon berasal dari NGO atau CSO, sedangkan 7 (47%) pemohon berasal dari perseorangan/individu. "Saat ini, kami sedang melayani permohonan informasi dari seorang ibu rumah tangga, yang meminta dokumen kontrak," papar Kusnandaka.

Menanggapi hal tersebut, Ketua KI Jatim Ketty, mengapresiasi Laporan Layanan Informasi Publik yang disampaikan ke Komisi Informasi. Sebagaimana diatur dalam pasal 36, PERKI No. 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Badan Publik wajib menyampaikan laporan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran. "Tahun ini, sudah banyak Badan Publik yang menyampaikan Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik ke KI," kata Ketty.

Sumber : Komisi Informasi Jawa Timur

Bulan April 2016

1. Bojonegoro Gelar Diklat PPID



Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, menggelar pendidikan dan pelatihan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yang diikuti 80 peserta dari jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD), mulai Minggu, (2/4) sampai Sabtu, (9/4).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Bojonegoro Kusnandaka Tjatur, di Bojonegoro, Senin, mengatakan, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan PPID ini, untuk meningkatkan kemampuan pejabat yang membidangi PPID, dalam memberikan pelayanan informasi publik.

Apalagi, lanjut dia, Bojonegoro, Bojonegoro terpilih sebagai percontohan keterbukaan Pemerintahan di Indonesia oleh sebuah lembaga yaitu “Open Government Indonesia” (OGI) bersama DKI dan Banda Aceh.

“Kalau memang Bojonegoro, Banda Aceh atau DKI, bisa tampil terbaik di Indonesia, maka akan maju ke tingkat dunia,” jelas dia.

Ia menyebutkan keterbukaan informasi publik di tingkat dunia ditangani sebuah lembaga non Pemerintah dengan nama “Open Government Partnership” (OGP), yang merupakan gabungan dari 60 negara.

Dengan masuknya Bojonegoro sebagai model keterbukaan Pemerintahan di Indonesia, katanya, Bupati Bojonegoro Suyoto, nantinya akan menyampaikan pola keterbukaan informasi publik ke daerah lainnya di Tanah Air.

“Kalau maju ke tingkat dunia, berarti pejabat daerah setempat harus memberikan materi keterbukaan informasi publik kepada negara lainnya di dunia,” ujarnya. Dirinya menambahkan dalam pendidikan dan pelatihan PPID itu, untuk pemberi materi selain dari Komisi Informasi, juga jurnalis.

Pendidikan dan pelatihan PPID dibuka langsung Bupati Bojonegoro Suyoto, yang juga dihadiri Wakil Bupati (Wabup) Setyo Hartono, juga Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Soehadi Moelyono. (MC Bojonegoro)

2. Bojonegoro Terpilih sebagai Percontohan Pemerintah Daerah Terbuka Open Government Partnership



Kabupaten Bojonegoro terpilih mewakili Indonesia sebagai daerah percontohan pada ajang “Open Government Partnership (OGP) Subnational Government Pilot Program” atau Percontohan Pemerintah Daerah Terbuka. Berita baik ini akan segera diumumkan resmi oleh Sekretariat OGP dalam waktu dekat. Kabupaten Bojonegoro bersama Kota Seoul (Korea Selatan) dan Kota Tbilisi (Georgia) adalah percontohan pemerintah daerah pertama di Asia, bersanding dengan 13 kota besar di dunia dari 45 kota yang mendaftar pada ajang ini. Dua pemerintah daerah lain di Indonesia yang turut mendaftar antara lain Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Banda Aceh. Kedua pemerintah daerah sudah menyatakan kesiapan mereka dalam jejaring kerja OGP sebagai ajang bertukar pengalaman, pengetahuan, dan inovasi terkait pemerintah yang terbuka. Proses selanjutnya, Kabupaten Bojonegoro bersama 14 daerah terpilih lainnya akan mendapatkan pendampingan dari Sekretariat OGP untuk menyusun sebuah Rencana Aksi Daerah (RAD). RAD ini akan berisikan sejumlah komitmen untuk memperkuat gerakan-gerakan keterbukaan pemerintah yang sudah ada. Penyusunan RAD akan dipimpin oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan melibatkan partisipasi aktif publik. Sebagai salah satu prasyaratnya, pemerintah daerah harus membuka proses pemantauan pencapaian RAD dengan masukan publik. Direktur Aparatur Negara,

Kementerian PPN/Bappenas sekaligus Koordinator Nasional Open Government Indonesia (OGI), Raden Siliwanti menyatakan, “Pemerintah pusat harus mampu menangkap, menghargai, dan membantu mengembangkan setiap inovasi kecil yang diprakarsai oleh rekan-rekan di daerah. Hanya dengan demikian kita mampu menebarkan benih keterbukaan ke lebih banyak daerah maupun instansi pemerintah pusat lainnya.” Lebih lanjut, Siliwanti menambahkan bahwa upaya ini juga sejalan dengan salah satu agenda prioritas dalam Nawacita Presiden Joko Widodo yang mengamanatkan bahwa pemerintah harus selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Bupati Bojonegoro, Suyoto, telah mengukuhkan kesiapan jajarannya sebagai percontohan bagi Pemerintah Daerah Terbuka OGP. Ia mengatakan, “Kami memastikan jajaran kami akan solid dalam menjamin keterbukaan dan partisipasi publik di pemerintahan daerah. Keterbukaan itu sangat penting artinya untuk menjaga kepercayaan publik pada pemkab. Dimana kepercayaan itu akan menentukan partisipasi publik dalam pembangunan”

Program Percontohan Pemerintah Daerah Terbuka OGP ini adalah yang pertama kali dilakukan sejak kemitraan OGP terbentuk di bulan September 2011. Kemitraan ini bertujuan untuk mendukung kemajuan keterbukaan pemerintah sesuai dengan aspirasi dan komitmen nyata sebagaimana dicanangkan oleh setiap negara anggotanya. OGP mendorong negara-negara anggotanya untuk mewujudkan transparansi, partisipasi publik, akuntabilitas dan inovasi dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahannya sebagai konsekuensi alamiah dari suatu negara demokrasi.

Di Indonesia, OGP dikoordinasikan oleh Sekretariat Nasional Open Government Indonesia. OGP melihat momentum gerakan keterbukaan di tingkat pemerintah daerah perlu diberi dukungan ekstra untuk membantu menyebarkan semangat keterbukaan dalam skala yang lebih luas. Semangat keterbukaan ini diharapkan dapat turut mendorong Pemerintah Daerah sebagai ujung tombak pemerintah di masyarakat agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik mereka. Itulah yang menjadi latar belakang utama peluncuran program percontohan ini. Proses seleksi OGP Subnational Government Pilot ini diikuti oleh lebih dari 40 pemerintah daerah dari 69 negara anggota OGP.

Direktur Eksekutif International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Sugeng Bahagijo, menyambut baik terpilihnya Bojonegoro sebagai pelopor pemerintah daerah terbuka. “Pemerintah daerah merupakan pilar dari Indonesia. Jika keterbukaan hanya berhenti pada pemerintah pusat, maka keterbukaan hanya bersifat parsial. Reformasi keterbukaan ini harus diikuti oleh setidaknya 400-500 pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia.”

Lebih lanjut Sugeng menambahkan, “Indonesia sebagai salah satu negara pendiri OGP sekaligus steering committee OGP perlu membuktikan bahwa keterbukaan tidak hanya memberikan manfaat bagi pemerintah dan media semata namun juga kepada seluruh warga negara di manapun. Karena itu partisipasi dan keterbukaan semua kota dan kabupaten di Indonesia adalah mandatory bukan optional. Hal ini juga menjadi salah satu prinsip yang dibawa untuk pelaksanaan Agenda Sustainable Development Goals (SDGs), terutama pada Tujuan 16 tentang ‘keadilan, perdamaian, dan tata pemerintahan yang akuntabel’.”

INFID dan Kelompok Masyarakat Sipil lainnya seperti Yayasan TIFA, Transparency International Indonesia, Medialink, dan FITRA terus mendorong pemerintahan terbuka di semua lini.

sumber : opengovindonesia.org

Bulan Mei 2016

Buku Inovasi Dasa Wisma Bukti Sinergitas PKK Kabupaten Bojonegoro Dengan Pemerintah



Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, punya cara jitu mendokumentasikan dan mengevaluasi setiap kegiatannya. Caranya, pelbagai kegiatan setiap keluarga dicatat di buku Dasa Wisma oleh Ibu-Ibu aktivis desa/kelurahan yaitu kader PKK dasa wisma hingga PKK desa.

Hasilnya, pengurus PKK di Kabupaten Bojonegoro ini, bisa mudah melihat potret kegiatan penggerak dari tingkat kecamatan hingga di desa/kelurahan dan utamanya dapat memotret perkembangan kualitas SDM di tingkat desa melalui Program buku data dasawisma yang sudah dimulai tahun 2014-2015 dan yang tengah berjalan, tahun 2016 ini. Buku ini, berpatokan pada proyeksi Pembangunan Bojonegoro ke depan, yang tertuang di Program Gerakan Desa Sehat Cerdas (GDSC) yang digagas Bupati Bojonegoro Suyoto.

Menurut Ketua Tim Penggerak PKK Bojonegoro, Mahfudhoh Suyoto, bahwa buku yang digagasnya ini bagian dari program inovasi dan unggulan PKK Kabupaten Bojonegoro. Karena dengan cara pendataan inilah Pemerintah dapat menolong rakyatnya.

“Karena, dapat melihat potret rakyatnya dengan nyata dan terupdate tiap bulannya. Dan PKK ikut membantu pemerintah dengan menggerakkan keluarga supaya berdaya lebih baik,” ujarnya pada Kanalbojonegoro di acara dasawisma di Kecamatan Purwosari (24/5).

Menurutnya, tim penggerak PKK ada di masyarakat sekaligus bagian dari masyarakat. Apalagi, yang disebut dasawisma itu adalah 10 rumah yang ada di lingkungan warga. Selain itu, PKK merupakan tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan tentu punya tujuan mulia. Yaitu menggerakkan keluarga agar sehat, cerdas, mandiri, bahagia dan sejahtera.

Dengan tujuan seperti itu, lanjutnya, PKK hadir harus membantu Pemerintah untuk mewujudkan cita-cita bersama. Yaitu masyarakat adil dan makmur dalam keluarga bahagia bisa terwujud. Oleh karenanya sinergitas PKK dan Pemerintah harus terjalin dengan baik dan harmonis.

Mahfudhoh menjelaskan, bahwa data catatan keluarga yang terangkum dalam buku data dasawisma, harus diisi dengan jujur dan apa adanya. Karena dengan demikian bisa mempermudah melihat potret kondisi desa yang sebenarnya. Kemudian di dalam datanya terdapat minimal 15 petunjuk: Pertama, soal ekonomi keluarga, ke dua, pendidikan keluarga, ketiga kesehatan keluarga, keempat harmonisasi, kelima pemanfaatan pekarangan, keenam pekerjaan kepala keluarga, ketujuh kependudukan, kedelapan kemiskinan, sembilan pemakaian alat kontrasepsi, 10 kepemilikan jamban, 11 yaitu angka kematian ibu dan angka kematian bayi (AKI/AKB), 12 pengangguran ,13

jaminan hari tua seperti apakah keluarga punya jaminan asuransi dan 14 menyangkut surat-surat penting keluarga seperti punya akte kelahiran dan sebagainya.

“Kelihatannya sepele, tapi sangat penting,” tukasnya.

Harapan kedepannya, pemerintah dapat menggunakan data ini sebagai salah satu bahan acuan dalam merencanakan program kerja kedepan yg berkelanjutan, hingga pd saatnya potret desa dapat lebih baik, SDMnya berkualitas. “Itulah namanya Bojonegoro Matoh,” tandas wanita itu.

Kepala Kelurahan Klangan, Bojonegoro, Joko Tri Cahyono mengatakan, buku data dasawisma bermanfaat untuk mempermudah profil desa/kelurahan. Misalnya soal pendidikan keluarga, kesehatan dan pekerjaan. “Kita berharap data dasawisma ini terus update,” tegasnya pada Kanalbojonegoro, Senin (30/5).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Bojonegoro, Kusnandaka Tjatur Prasetya mengatakan, program buku data dasawisma, aksesnya akan dimudahkan lewat program internet di desa-desa. Nantinya, data dasawisma bisa terus didukung oleh beberapa komunitas seperti Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi (RTIK) dan Komunitas Blogger Bojonegoro. “Jadi, kegiatan Ibu-Ibu PKK, bisa mudah diakses digital,” tegasnya pada Kanalbojonegoro.

Kusnandaka mencontohkan, selama ini kegiatan Ibu-ibu PKK jarang termonitor karena kurang publikasi. Padahal, kegiatan PKK itu menyebar dari tempat di kota-kota hingga di pelosok desa. Di Kecamatan Margomulyo misalnya, Ibu-ibu membuat program bayi sehat. Tetapi karena jarak tempuh Kota Bojonegoro-Margomulyo, sekitar 70 kilometer, kegiatan Ibu-ibu PKK, jarang diketahui masyarakat. Namun, dengan kemajuan teknologi, kegiatan ini bisa diketahui. “Orang Jakarta dan luar Negeri bisa tahu,” imbuhnya. (*/mcb)

Bulan Juni 2016

DPRD Bojonegoro Susun Raperda KIP



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif, salah satunya Raperda tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Wakil Ketua Komisi A, Anam Warsito, mengatakan, raperda ini merupakan usulan Komisi A dan memasuki tahapan pembahasan dalam Focus Group Discussion (FGD) pada akhir Mei lalu.

“Dalam FGD tersebut, kami mengundang pihak terkait mulai dari SKPD, instansi, LSM serta masyarakat untuk menyampaikan masukannya terhadap Raperda KIP ini,” imbuhnya, Senin (13/6). Dia mengatakan, pada penyusunan naskah akademik Raperda ini dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Pengaturan keterbukaan informasi publik di daerah ini, lanjut Anam, bertujuan untuk menjamin hak warga masyarakat untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.

“Serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu keterbukaan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.(dwi/mcb)

Bulan Juli 2016

1. Bupati Bojonegoro Suyoto Menjadi pembicara dalam acara Sosialisasi LAPOR-SP4N yang digelar Kementerian PANRB di Jakarta, Pada 19 Juli 2016



Di awal masa jabatannya tahun 2008, Bupati Bojonegoro Suyoto dihadapkan banyak permasalahan di daerahnya. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi di Bojonegoro rendah, infrastruktur rendah sehingga masyarakat sangat tidak puas dengan kinerja pemerintah, dan memiliki sejarah panjang dalam kemiskinan (*endemic poverty*).

Masyarakat Bojonegoro sepertinya sudah memiliki stigma dan selalu berpikir bahwa birokrat selalu melakukan korupsi. Hal ini dikarenakan infrastruktur yang dibangun Pemda Bojonegoro selalu cepat rusak. “Padahal kondisi geografis di Bojonegoro memang sangat labil dan membuat infrastruktur dan jalan mudah rusak,” ujar Suyoto dalam acara Sosialisasi LAPOR-SP4N yang digelar Kementerian PANRB di Jakarta, Selasa (19/07).

Ternyata kuncinya, menurut Suyoto, adalah transparansi. Selama ini, masyarakat kurang merasakan kehadiran pemerintah karena tidak adanya keterbukaan. Oleh karena itu, tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat Bojonegoro terhadap kinerja pemerintah rendah. “Kalau terbuka, walaupun ngga ada duit, akan dimaafkan rakyat. Kalau ditutup-tutupi, masyarakat tidak akan percaya terus,” ujarnya.

Bupati yang akrab dipanggil Kang Yoto ini memilih untuk memberikan nomer HP-nya untuk menerima keluhan masyarakat. Dia mengatakan bahwa dari 300 sms yang diterimanya setiap hari, berisi ungkapan kemarahan warganya. “Saya umumkan nomer HP saya lewat radio,” ujarnya.

Dengan adanya keluhan masyarakat ini, muncul ide untuk manajemen informasi berbasis publik. “Bagaimana mengelola “suara setan” kemudian terwujud sesuai harapan masyarakat,” sergahnya.

Kang Yoto mulai membangun pemerintahan yang terbuka. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, di internal Pemda Bojonegoro membangun Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA), SIRUP dan SIPPPDA. Sementara untuk eksternal, ada Sistem Monitoring (SISMON) dan LAPOR. “Mulanya merasa sulit karena berbau IT. Kepala dinas saja ada yang tidak bisa caranya sms,” ungkap Kang Yoto sembari tersenyum.

Pengaduan masyarakat melalui SMS ke *handphone* Bupati, pos surat, email isntansi, radio, ataupun telepon akan diinput manual ke SMS atau aplikasi LAPOR. Kang Yoto menyadari bahwa tidak semua masyarakat dapat menulis, oleh karena itu difasilitasi dengan dialog yang diselenggarakan tiap hari Jumat. “Kita yang aktif menginput. Mengakomodir aspirasi rakyat,” ujarnya.

Keluhan masyarakat ini dijadikan evaluasi kinerja. Masing-masing SKPD menindaklanjuti laporan yang masuk. Dengan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi masyarakat, Pemkab Bojonegoro kemudian memasukkannya ke dalam program pemerintah. “Jadi kita bikin KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang dimulai dari perencanaan apa yang menjadi harapan rakyat kemudian kita jadikan KAK Satker. Jadi *money follow program*,” jelasnya.

Bupati Bojonegoro menyampaikan bahwa kunci kesuksesan ada pada kolaborasi empat sekawan, yakni pemerintah pada semua tingkatan dan kelembagaan, masyarakat, akademisi, dan pengusaha. Dengan adanya keterbukaan ini, dampak positif sangat terasa di Bojonegoro. Harga barang tidak cepat naik, pengangguran turun, angka kemiskinan turun. “Semua orang ikut berpartisipasi, indeks kepuasan naik terus,” jelasnya menambahkan. (rr/HUMAS MENPANRB)

2. Kang Yoto Berbagi Pengalaman Tentang Open Government Bojonegoro Pada Tanggal 21 juli 2016 di Manila



Sebagai salah satu daerah yg diakui di tingkat internasional sebagai pemerintahan yang sukses menjalankan pemerintahan yang terbuka (open government), Bupati Bojonegoro, Suyoto diundang

untuk berbagi pengalaman dengan negara lain pada acara Panel Diskusi Asian Development Bank and Open Government Partnership (ADB-OGP) di Manila Philipina, Kamis (21/7).

Acara ini dimoderatori Joe Powell, Deputy CEO OGP support unit serta diikuti oleh lebih dari 100 org peserta dari daerah/negara yang ditetapkan menjalankan pemerintahan terbuka serta beberapa lembaga internasional seperti PBB, ADB, UNDP, WWF dan IDFI.

Dalam acara ini, bupati yang akrab disapa Kang Yoto ini menguraikan hakekat dari pemerintahan yang terbuka adalah keterbukaan akan informasi atau data, keterbukaan akses bagi rakyat dan keterbukaan untuk memberikan saran, menyampaikan keluhan dan berpartisipasi dalam pembangunan. "Contoh implementasi yang sudah dijalankan Bojonegoro mulai tahun 2008 salah satunya adalah dialog publik yang bisa diikuti siapapun, terutama warga yang menyampaikan keluhan dan saran," terang KY.

Pria berkacamata ini juga menjelaskan, proses transformasi pemerintahan di Bojonegoro didukung oleh enam pilar pembangunan berkelanjutan dan tujuh elemen transformasi. "Pemerintahan terbuka ini akan terus dilakukan seiring dengan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan (SDGs),' imbuhnya.

Diuraikannya, SDG's sendiri memuat beberapa program, diantaranya adalah:

1. Peningkatan pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, perijinan dan infrastruktur.
2. Perencanaan dan pengawasan yang lebih baik terkait desa membangun yang didukung gerakan desa sehat cerdas (GDSC)
3. Pengelolaan anggaran yang diketahui publik hingga rincian penggunaan sebagai alat perencanaan anggaran yang baik.
4. Mekanisme partisipasi publik regulasinya akan ditingkatkan dari Perbup menjadi Perda.
5. Revolusi data. Satu data, satu kebijakan, yang up to date dan terintegrasi menunjang pembangunan dan kepentingan rakyat (smart city/regency).

"Inilah kekuatan Bojonegoro sebagai kolaborasi pemerintah di semua tingkatan, rakyat, para akademisi dan pengusaha. Bahwa OGP ini telah melewati tiga fase peningkatan, keberlanjutan dan optimalisasi. Dan The power of We sebagai pondasi sinergitas dan kolaborasi aksi," pungkasnya.(mcb)

Bulan Agustus 2016

1. Bupati Bojonegoro Menjadi Salah satu Pembicara dalam Event Data for Life 2016 yang digelar oleh Mediatrac pada Tanggal 30 Agustus 2016 di Ritz-Carlton, Pacific Place, Jakarta



Bupati Bojonegoro, Jawa Timur Drs. H Suyoto mengatakan bahwa Bojonegoro merupakan Kabupaten pertama yang menerapkan big data. Sehingga data bisa diakses mulai dari data terendah. "Dengan bukti tersebut, sudah dapat dipastikan banyak orang handal di belakangnya. Jadi, semua itu tergantung niat kita yang ingin terus maju dan mengukir prestasi atau hanya diam dan menunggu mutasi," katanya di acara conference Data for Life 2016 di Ritz Carlton Ballroom, Pacific Place, Jl Sudirman, Jaksel, Selasa (30/8)

Penggunaan data secara tepat penting untuk interpretasi persoalan-persoalan pembangunan di berbagai wilayah di Indonesia.

Selanjutnya dikatakan Suyoto bahwa Bojonegoro merupakan satu-satunya kabupaten di Indonesia yang terpilih untuk menjadi pilot project *open government partnership* (OGP) hingga kancah dunia.

"Bojonegoro mempunyai lima sasaran yang menjadi goal dalam mensukseskan OGP. Diantaranya, peningkatan layanan publik (pendidikan, kesehatan, perijinan), pembangunan infrastruktur, pemdes merupakan sasaran baru pemkab dalam menerapkan OGP melalui GDSC," jelasnya.

Selain itu lanjut Bupati, juga meningkatkan transparansi anggaran, serta mekanisme akuntabilitas dan partisipasi publik. Transparansi adalah tahapan pertama dari proses pembangunan yang efektif ini. Setelah itu partisipasi atau keikutsertaan masyarakat merupakan langkah selanjutnya. Lalu memastikan kolaborasi dengan sejumlah stakeholders dan ahli terkait. (Doddy/SiK/elshint.com)

CEO Mediatrac Regi Wahyu mengatakan, "Festival ini kami adakan untuk membangun sebuah ekosistem kolaborasi yang dapat membantu terbangunnya masa depan yang lebih baik. Kami mengajak berbagai pihak untuk berbagi dan menggali wawasan [*big data*] dengan para pemikir terbaik dari seluruh dunia dan membuktikan bahwa bangsa kita bisa berinovasi dan bersaing dalam bidang teknologi yang masih baru ini."

Dalam festival ini, Meditrac menghadirkan beberapa pembicara terkemuka di bidangnya untuk saling bertukar pikiran mengenai manfaat penerapan *big data* untuk kehidupan yang lebih baik.

Beberapa yang hadir di hari pertama adalah Marc Goodman (Pengarang Buku Future Crimes), Sangeet Choudary (CEO Platform Thinking Labs), Venzha Christiawan (New Media Artist), Sunita Kaur (Managing Director Spotify Asia), para pelaku startup teknologi Indonesia seperti Aidil Zulkilfi (UangTeman) dan Belva Devara (RuangGuru), hingga Bupati Bojonegoro Drs. H Suyoto, M.Si. Suyoto sendiri menyampaikan presentasi yang cukup menarik mengenai bagaimana Bojonegoro menerapkan Open Government Process untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya yang kini juga bekerja sama dengan Mediatrac. Mulai dari memanfaatkan platform SMS, Facebook, Radio, hingga Sistem LAPOR dan Open Data untuk mendengar berbagai keluhan masyarakat dan transparansi data.

maupun narasumber di berbagai kesempatan kegiatan yang dilakukan NGO Nasional, dan study tiru komparasi dari berbagai Pemkab/Pemkot, dan berbagai pihak yang berkepentingan dengan keterbukaan.

2. Bojonegoro Gelar Pemilihan Duta Keterbukaan Anggaran Desa



Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menggelar Pemilihan Duta Keterbukaan Anggaran Pemerintahan Desa (DKAPD). Dari 430 desa/kelurahan di kabupaten ini, dipilih nominator yang pengelolaan anggarannya terbuka dan berpihak ke masyarakat.

Kegiatan pemilihan DKAPD pada Agustus 2016 ini baru pertama kali digelar di Kabupaten Bojonegoro. Tujuannya untuk meningkatkan layanan ke masyarakat dan anggaran terbuka.

Acara ini melibatkan aktivis LSM dan jurnalis. Kegiatan ini digelar setelah Pemerintah Bojonegoro terpilih menjadi wakil Indonesia sebagai daerah percontohan di Open Government Partnership atau percontohan pemerintah terbuka bersama 13 kota besar dunia.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bojonegoro, Kusnandaka Tjatur, mengatakan kegiatan DKAPD ini bagian dari dilaksanakannya pemerintahan terbuka. Dan sasarannya adalah mengaktifkan dan menjalankan model keterbukaan di lingkungan pemerintahan di tingkat bawah, yaitu di desa dan kelurahan. "Jadi, ini menyentuh langsung di bawah," kata dia, Senin, 8 Agustus 2016.

Nantinya 430 desa/kelurahan di Bojonegoro didorong untuk mengelola perangkat informasi, seperti papan reklame, baliho, leaflet, buklet, dan sejenisnya. Kemudian membuat website desa/kelurahan yang berfungsi memberikan layanan informasi dari pemerintah ke warga sekitarnya. Misalnya, bagaimana model tata kelola keuangan desa/kelurahan serta penggunaan biaya dan sejenisnya. Tujuannya agar masyarakat bisa tahu dan mendapat informasi yang benar tentang pengelolaan anggaran.

Direktur Bojonegoro Institut, Syaiful Huda, menyambut baik kegiatan pemilihan duta keterbukaan anggaran desa. Kegiatan ini, kata dia, bisa mendorong kepala desa/lurah serta perangkat desa untuk terlibat langsung dalam proses pembuatan anggaran desa. "Agar bisa membangun pemerintahan terbuka, termasuk pengelolaan anggarannya," katanya.

Source : <https://nasional.tempo.co/read/news/2016/08/08/058794289/bojonegoro-gelar-pemilihan-duta-keterbukaan-anggaran-desa>

Warga Desa Apresiasi Keterbukaan APBDes

KAPAS - Instruksi Bupati Suyoto agar desa mulai membuka transparansi anggaran direspons pemerintah desa. Transparansi tersebut terkait program *open government partnership* (OGP). Tiap desa diperintahkan mengumumkan secara transparan perencanaan dan realisasi APBDes di tempat-tempat umum dalam bentuk spanduk atau banner.

Timin, salah seorang warga Desa Kaliyanyar, Kecamatan Kapas, mengaku senang dengan sikap terbuka dalam pengelolaan maupun pelaksanaan APBDes. "Saya sangat senang dan mendukung apa yang telah dilakukan Pemerintah Desa Kaliyanyar dengan pemasangan banner besar penggunaan dana desa," jelasnya kepada wartawan koran ini kemarin (21/8). Beberapa desa atau kelurahan lain yang telah melaksanakan instruksi OGP antara lain Desa Sedahkidul (Purwosari), Desa Deling (Sekar), Desa Mayangrejo (Kalitidu), Desa Ngasem (Ngasem), Desa Pancur (Kecamatan Temayang) dan lainnya.

Dikonfirmasi terpisah, Bagian Pemerintahan Setkab Bojonegoro Imam Affan memberikan apresiasi terhadap desa-desa yang melakukan keterbukaan APBDes sebagai bagian mewujudkan *good governance*. "Salah satu bentuk sistem pemerintahan yang baik ialah keterbukaan anggaran yang perlu dilakukan oleh desa selaku tingkat pemerintahan lokal paling dasar," tuturnya.

Ia menambahkan, keberhasilan Pemkab dalam menciptakan transparansi dan partisipasi publik perlu diarahkan pada desa. "Keberhasilan Kabupaten Bojonegoro tersebut akan di *breakdown* ke pemerintah desa, sehingga ke depan ditargetkan memiliki transparansi dan partisipasi publik yang baik," pungkasnya. (hmy/nas)

Salah satu bentuk sistem pemerintahan yang baik ialah keterbukaan anggaran."

IMAM AFFAN
Bagian Pemerintahan Setkab Bojonegoro

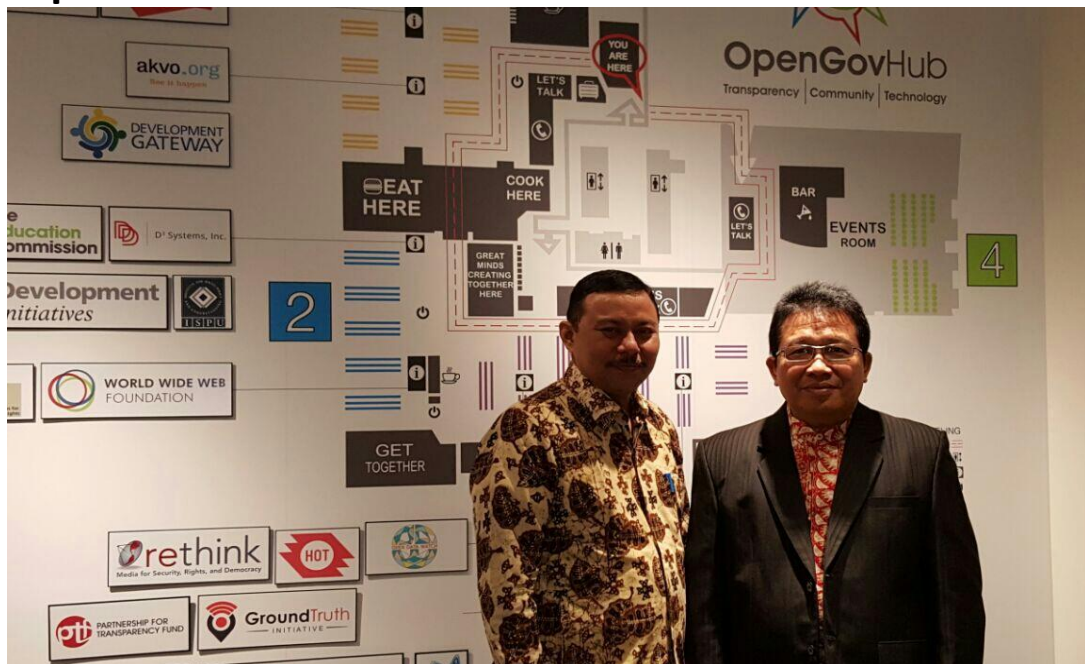
Koran Radar Bojonegoro
Jawa Pos
22 Agustus 2016

arsip
www.ppid.bojonegorokab.go.id
PPID KABUPATEN BOJONEGORO
Hak Anda untuk tahu!

Februari 2012
organik media
asetal

Bulan September 2016

- 1. Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro mewakili Indonesia untuk memberikan testimoni soal percontohan Pemerintahan Terbuka atau Open Government Partnership (OGP) di Washington DC, Amerika Serikat, Pada Tanggal 15 sampai dengan 16 September 2016.**



Bojonegoro merupakan salah satu dari 15 subnational region level yang terpilih sebagai pilot project Open Government Partnership dari 69 negara anggota Open Government Partnership (OGP) telah melakukan pertemuan di Washington DC tanggal 15-16 September 2016, Bojonegoro salah satunya. Para peserta OGP subnational Government Pioneers Meeting mempunyai kesamaan pandangan, keterbukaan pemerintahan adalah kebutuhan yang harus dilakukan untuk mendorong terwujudnya kesejahteraan, menguatkan kepercayaan dengan mengembangkan kolaborasi antar pihak.

Selama dua hari para peserta berbagi pengalaman bagaimana mengembangkan keterbukaan pemerintahan, kendala dan tantangan serta bagaimana strateginya.

Bupati Bojonegoro Kang Yoto menyampaikan cara Bojonegoro mendorong tumbuhnya kepercayaan dengan membuka akses kepada masyarakat yang secara langsung dapat menyampaikan keluhan dan pengaduan melalui HP, dialog publik, Layanan Aspirasi Pengaduan on-line Rakyat (LAPOR) yang terintegrasi dengan seluruh sarana akses pengaduan masyarakat. Seluruh pengaduan dan aspirasi masyarakat, dilakukan kajian tindak lanjut dan evaluasi yakni Manajemen Review setiap hari Jum'at.

Target SDGs, merupakan bagian capaian strategi pemerintahan terbuka yang dilakukan oleh Kabupaten Bojonegoro. _Co-creation_, tata kelola pemerintahan dari _individual_ didorong menjadi _institusional_ sehingga terwujud sebagai _cultur_, merubah dari _selfis_ ke _servis_ serta dari _ego_ ke _eco_.

Keterbukaan pemerintahan yang telah dikembangkan Kabupaten Bojonegoro telah memberikan hasil meningkatnya pertumbuhan ekonomi (19,87 dengan migas, 5,99 tanpa migas), peningkatan NTP, penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Pengalaman Kabupaten Bojonegoro dalam pengelolaan keterbukaan pemerintahan menarik para subnational, salah satunya dari Kigoma Tanzania yang menyampaikan untuk melakukan kerjasama dengan Bojonegoro.

Diskusi produktif dalam sesi pembahasan dan saling sharing terkait dengan Rencana Aksi masing masing subnational yang akan diimplementasikan pada tahun 2017, merupakan bagian kolaborasi yang konstruktif. Untuk mengembangkan, meningkatkan, menguatkan, mengintegrasikan dan keberlanjutan pemerintahan terbuka, ada 5 komitmen yang akan dilakukan oleh Kabupaten Bojonegoro yaitu :

1. Revolusi data, penguatan data dari tingkat pemerintahan desa menuju one data Bojonegoro, single data yang reliable, realtime.
2. Penguatan keterbukaan pemerintahan desa dan keberdayaan masyarakat,
3. Penguatan partisipasi publik dalam pembangunan daerah dan keberlanjutan keterbukaan dengan penetapan Peraturan Daerah.
4. Peningkatan partisipasi publik dalam proses perencanaan, yakni terlibatkannya stakeholder pada semua tahapan, pembahasan KAK Perencanaan, evaluasi dan monitoring serta publikasi APBD yang mengacu pada kaidah keterbukaan publik.
5. Peningkatan kualitas pelayanan pada sektor layanan kesehatan, perizinan, pendidikan, sarana infrastruktur dan usaha kecil dan menengah.

Rencana aksi tersebut akan difinalisasikan akhir bulan September dan akan di celebrasikan pada Festival OGP bulan Oktober sebagai rangkaian kegiatan Hari Jadi Bojonegoro. Seluruh SKPD hingga tingkat desa mempublikasikan akuntabilitas pengelolaan anggaran tahun 2016 serta pokok pokok perencanaan anggaran tahun 2017 serta dilakukan pemeringkatan indek keterbukaan terhadap seluruh SKPD dan Pemerintahan Desa.

Disamping itu seluruh SKPD yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Rencana Aksi OGP merumuskan sub Rencana Aksi di tiap SKPD dan strategi pencapaiannya. Rencana aksi pemerintah terbuka dari seluruh subnational pilot project OGP, akan di celebrasikan pada bulan Desember 2016 di Paris, sebagai bentuk komitmen yang harus dilakukan pada tahun 2017.

Implementasi Rencana Aksi akan dilakukan pendampingan dan evaluasi oleh OGP sehingga secara dini dapat diketahui secara dini berbagai kendala dan hambatan serta sejauhmana ketepatan dan komitmen dalam pelaksanannya. Perumusan rencana aksi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dilakukan secara kolaborasi dengan berbagai elemen 4 sekawan, yaitu pemerintah, akademisi, pengusaha dan masyarakat/ NGO.

Pada bulan Maret 2017, OGP akan melakukan evaluasi secara independen (Independen Report Mekanisme/ IRM) hingga akhir Desember 2017. Bulan Maret 2018, OGP akan menyampaikan hasil IRM terhadap komitmen pelaksanaan open government.

Di sela-sela kegiatan meeting, dari VOA Suara Amerika, melakukan wawancara dengan Kang Yoto, terkait pelaksanaan keterbukaan pemerintahan terbuka di Kabupaten Bojonegoro. Setelah selesai acara meeting OGP, Kang Yoto menghadiri undangan USAID.

Amanda Conklin (Program Operations Analyst) bersama Tim USAID menerima Kang Yoto dan menggali secara jauh bagaimana proses co-creating, collaboration dan sustainabel development di Kabupaten Bojonegoro. Tim USAID mengapresiasi dan akan menibdaklanjuti melakukan pendampingan guna memperkuat model pemerintahan terbuka.

Dari pelaksanaan OGP subnational government pioners meeting, memberikan pembelajaran bagi kita,

1. bahwa tatakelola pemerintahan yang telah dilakukan oleh pemerintah Bojonegoro sudah _on thr track_,
2. Penguatan _collaboration_ para pihak harus dikembangkan.
3. Untuk peningkatan dan keberlanjutannya, maka sinergitas dan masukan, ide konstruktif sangat diperlukan dengan penguatan berbagai akses informasi,

4. Perubahan pola pikir sebagai pelayanan bagi seluruh penyelenggara pemerintahan dan komitmen terbuka, adalah budaya yang harus dikuatkan. _Washington_, 17 September 2016. (Kusnandaka)

2. Bojonegoro Umumkan Pengelolaan dan Penggunaan Anggaran Desa

Desa/kelurahan di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, mulai menerapkan konsep pemerintahan terbuka. Salah satunya, dengan mengumumkan pengelolaan dan penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) melalui baliho, pamflet, spanduk, dan situs desa.

Pantauan Tempo di kantor Kecamatan Kanor, sudah terpasang 15 baliho, sisanya 10 baliho menyusul pekan ini. Isinya terkait dengan pengelolaan dan rincian penggunaan ADD. Mulai dari pembangunan desa, biaya sosial, hingga anggaran lain yang bersumber dari dana desa.

“Ini konsekuensi penerapan konsep pemerintahan terbuka. Dana desa harus diketahui masyarakat,” kata Camat Kanor Subiyanto kepada Tempo, Sabtu, 3 September 2016.

Adapun program pemerintahan terbuka bergulir setelah Kabupaten Bojonegoro ditetapkan sebagai percontohan open government partnership (OPG), menyingkirkan Provinsi DKI Jakarta dan Kota Banda Aceh, yang juga masuk nominasi awal April 2016. Bojonegoro jadi percontohan pemerintah daerah pertama di Asia yang sejajar dengan 13 kota besar di dunia yang ikut kontes di program ini, bersama Kota Seoul, Korea Selatan; dan Kota Tbilisi, Georgia.

Itu sebabnya, Kabupaten Bojonegoro menerapkan program pemerintahan terbuka mulai dari pemerintahan desa/kelurahan hingga di tingkat yang lebih tinggi. Program tersebut telah diterapkan sejak pekan keempat Agustus 2016.

Tak hanya itu, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga menggelar Pemilihan Duta Keterbukaan Anggaran Pemerintahan Desa (DKAPD). Nantinya, dari 430 desa/kelurahan di kabupaten tersebut, akan dipilih nominator yang pengelolaan anggarannya terbuka dan berpihak ke masyarakat. Acara yang melibatkan aktivis LSM dan jurnalis ini telah dimulai pertengahan Agustus 2016.

Sebelumnya, Bupati Bojonegoro Suyoto mengatakan selain sebagai program pemerintahan terbuka, wilayahnya juga ditetapkan sebagai daerah Ramah Hak Asasi Manusia oleh pemerintah pusat pada Mei 2016. Bojonegoro juga dianggap sebagai kabupaten potensial untuk para investor. “Ini prestasi bersama,” ujar Suyoto, Kamis, 1 September 2016.

Suyoto menyebut, saat awal menjadi Bupati Bojonegoro 2008, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sekitar Rp 800 miliar, dan kini pada 2016, melonjak di kisaran Rp 3,4 triliun. Pendapatan dari dana bagi hasil migas menjadi pemasok tertinggi APBD. Namun, pemerintah Bojonegoro kini juga serius menggarap sektor non-migas, seperti pariwisata, pertanian, dan industri. Dengan besaran upah minimum kabupaten (UMK) Rp 1.462.000, Bojonegoro jadi tempat alternatif bagi pengusaha untuk berinvestasi.

Sumber : <https://nasional.tempo.co/read/news/2016/09/03/058801407/bojonegoro-umumkan-pengelolaan-dan-penggunaan-anggaran-desa>

3. Proyek Desa pun Terpantau Online

Pengalaman Bojonegoro Menjadi Pilot Project Internasional untuk Pemerintahan Terbuka

Bupati Suyoto mentransformasi pemda dari zaman "kegelapan" ke keterbukaan. Upayanya ditonjolkan oleh lembaga internasional OGP. Berikut catatan Rohman Budijanto dari JPIP.

Bupati Suyoto alias Kang Yoto siap-siap berbicara di Washington DC, 15–16 September mendatang. Dia akan diminta bercerita di forum bergengsi Open Government Partnership (OGP), yakni subnational pioneers tier meeting atau pertemuan tingkat pelopor daerah. Kang Yoto akan berbagi pengalaman dengan 14 kepala daerah lain dari empat benua yang sama-sama terpilih jadi pilot project (percontohan) OGP untuk inovasi terkemuka demi pemerintahan terbuka.

Sang bupati menjaring banyak masukan agar kemanfaatannya di forum internasional itu maksimal. "Tidak hanya menunggu, kami membiasakan memungut aspirasi," kata bupati yang menjabat pada periode kedua itu. Pekan lalu (23/8), dia menerima tim Kantor Staf Presiden (KSP), dipimpin Deputy II Yanuar Nugroho, serta Fithya Findie, kepala Sekretariat Nasioal (Seknas) OGP/OGI (Open Government Partnership/Open Government Indonesia) Bappenas. Hadir tim USAID yang dipimpin Luthfi Ashari, team leader Democracy Right and Governance Development Objective lembaga donor AS itu.

Fithya menjelaskan, Bojonegoro dipilih sebagai pilot project setelah lembaganya melakukan pemetaan. Setelah itu, terpilih DKI Jakarta, Kota Banda Aceh, dan Bojonegoro. Sebenarnya Surabaya juga sempat dijagokan. Dari evaluasi, Bojonegoro resmi menjadi percontohan pemerintahan terbuka untuk level daerah.

Setelah Bojonegoro terpilih, Seknas OGP/ OGI mendampingi pemda untuk menyusun rencana aksi daerah (RAD). Yakni, sejumlah komitmen untuk memperkuat gerakan-gerakan keterbukaan pemerintah yang sudah ada. Ini mesti melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan organisasi publik.

Dalam pertemuan itu, Yanuar Nugroho memberikan masukan strategis. Kang Yoto menyebut empat prinsip pembangunan Bojonegoro, yakni signifikan, relevan, logis, dan realistis. "Perlu ditambah inklusif," kata Yanuar yang disetujui Kang Yoto.

OGP memang ingin memperkuat ujung tombak untuk kampanye pemerintahan terbuka. Tentu saja pemda, baik provinsi maupun kabupaten/kota, jadi pilihan karena berhubungan langsung dengan rakyat.



Perjalanan Bojonegoro dalam membentuk diri menjadi pemerintahan terbuka dipaparkan di depan forum diskusi yang juga menghadirkan para kepala dinas itu. Contoh termutakhir ditunjukkan. Yakni, kewajiban seluruh 430 desa/kelurahan memasang di papan pengumuman APBDes serta daftar proyek. Dan, nomor HP kepala desa harus dicantumkan di sana.

“Kadang info yang masuk ke HP bupati sangat banyak. Padahal, cukup diselesaikan di level kepala desa,” kata Kang Yoto di forum yang juga dihadiri Zainuddin Amali dari DPR serta Ketua DPRD Mitro’atin itu.

Keterbukaan tersebut merupakan “revolusi” dari kondisi masa lalu. Pada masa pemerintahan sebelumnya, keluhan akan ketidaktransparanan pemerintahan sangat umum. Bupati sebelum Suyoto, yakni Santoso, harus masuk penjara karena korupsi APBD. Tragedi itu menyadarkan bahwa pemerintahan harus terbuka.

Begitu memerintah, Kang Yoto menggelar dialog Jumat di pendapa. Kepala-kepala dinas dan camat serta unsur pemerintahan harus mendengar aspirasi apapun yang muncul dalam forum tersebut. Tentu, harus siap dengan solusi. Keterbukaan “manual” itu rutin hingga sekarang.

Ikhtiar keterbukaan yang awalnya bersifat individual (misalnya, dialog, SMS, Facebook), diperkuat ke pelembagaan dengan tiga peraturan bupati. Selain itu, teknologi informasi dimaksimalkan. Sebagaimana dipaparkan Kepala Dinas Kominfo Kusnandaka Tjatur P., saluran aspirasi masyarakat yang dibuat pemkab punya link dengan saluran pengaduan di pusat seperti LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat, yang dikelola KSP) dan Open Data. Jadi, kalau ada pengaduan yang belum ditangani Pemkab Bojonegoro, pusat bisa mengetahui (selengkapnya lihat grafis).

Kini Bojonegoro juga pemeratakan pelayanan informasi kepada para petani yang merupakan mayoritas warga. Misalnya, lewat Simtapat (Sistem Informasi Tanam dan Panen Tepat). “Misalnya, ada wilayah terserang hama, kami bisa langsung tahu dan tangani,” kata Kepala Dinas Pertanian Akhmad Djupari yang juga diminta menjelaskan. Kang Yoto menambahkan, petani langsung difasilitasi obat anti hama gratis agar hama cepat disikat.

Inti upaya keterbukaan itu adalah menjadikan birokrasi yang selfis (ego) menjadi servis (eco). Gampangnya, dari minta dilayani menjadi melayani. Dengan begitu, terbentuklah suasana sigap dan kepuasan batin dalam merespons keluhan publik. Dan, ternyata insentif untuk kepala dinas yang dituntut kerja tangkas itu hanya Rp 500 ribu per bulan. Kang Yoto minta dibandingkan dengan DKI yang bisa Rp 60 juta.

Keterbukaan tersebut menyebar hingga ke tingkat desa. Dengan dibantu NGO Sinergantara dan Bojonegoro Institute, desa-desa mengaplikasikan pantauan online pembangunan lewat program Game My Village (GMV). Yakni, memantau proyek pembangunan berbasis peta digital desa. Misalnya, pembangunan jembatan di kawasan tertentu difoto mulai awal hingga akhir proyek. Warga, juga pemkab, bisa memantau secara online, termasuk mencari solusi bila ada kendala.

“Musrenbang desa jadi mudah. Begitupun dalam menentukan prioritas pembangunan,” kata M. Syafi’i, kepala Desa Ngringinrejo, Kalitidu. Desa itu dikenal sebagai sentra belimbing. Lahan 20 hektare milik lebih dari seratus warga disulap dari area banjir menjadi hutan belimbing. Selain tahan banjir, belimbing kontinu panen karena tak kenal musim. Pemberitaan online memopulerkan wisata belimbing desa itu.

“Keterbukaan membawa kesejahteraan,” kata Kang Yoto yang beristri Mahfudhoh. Keterbukaan membuat masyarakat percaya. Apalagi Bojonegoro ketiban rezeki dari migas Blok Cepu yang cadangannya mencapai 20 persen nasional. Pengelolaannya pun dilakukan dengan transparan. Uang migas tak dihabiskan, tetapi dijadikan dana abadi, yang bisa dinikmati jangka panjang. Sekitar Rp 400 miliar uang migas diinvestasikan untuk BPR dan saham Bank Jatim.

sumber : <http://www.jpip.or.id/artikelview-621-proyek-desa-pun-terpantau-online.html>

Bulan Oktober 2016

1. Pematangan Konsep Festival OGP



Tim penyusun festival open government partnership (OGP) terus matangkan strategi. Festival yang di gadang akan menghadirkan tiga menteri tersebut terus dikebut prosesnya.

Direncanakan festival ini akan dihadiri banyak tamu penting, diantaranya Ke Menpan RB bersama Menteri Perencanaan Pembangunan/Bappenas, Menteri Desa PPD, KPK dan Komisi informasi.

Kegiatan Festival ini sudah dimulai sejak awal Agustus lalu, dengan diawali penilaian untuk Pemerintah Desa yang terbuka. Penilaian transparansi Pemdes berakhir September kemarin, yang kemudian akan dipilih lima Desa sebagai pelopor menuju Pemerintah Desa terbuka.

"Kelima Desa pelopor tersebut nantinya akan di berikan awards saat perayaan HJB ke-339," ungkap Djoko Suharmanto, Kepala Bidang Jaringan Komunikasi Dinas Kominfo Bojonegoro.

Menurutnya, dari lima Desa yang akan diberikan awards tersebut tentu memiliki proses penilaian yang cukup panjang.

"Karena, Desa tersebut harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh tim penilai," katanya.

Kriteria itu lanjut Djoko, meliputi, transparansi anggaran yg dipublish di berbagai media, seperti baliho, poster, leaflet, papan informasi maupun media website dan blog desa. Kedua, Akuntabilitas meliputi proses musrenbangdes. Yang ketiga ialah peran masyarakat setempat dalam berpartisipasi dalam menggerakkan keterbukaan di desanya.

"Dan yang terakhir, Inovasi dan IT, inovasi yang dimiliki masing-masing Desa untuk kemajuan desanya," imbuhnya.

Selain Pemdes, seluruh SKPD juga akan mempublish anggaran, disamping display berbagai aplikasi yang dimiliki Pemkab Bojonegoro. Seperti, SIAP LAPOR yang mengintegrasikan berbagai sarana keluhan masyarakat untuk ditindak lanjuti SKPD, Sistem tanam tepat, dan lainnya.

Untuk pelaksanaan festival itu sendiri, Lanjut Joko berbagai persiapan telah disusun. Yang meliputi showcase/pameran Bojonegoro sebelum OG, proses OG dan harapan kedepan setelah menjadi OG. Kemudian, diskusi panel dengan narasumber 3 menteri dan KPK bertempat di gedung baru Pemkab lantai 7.

Dalam pelaksanaan festival OGP nantinya direncanakan akan bersamaan dengan peresmian gedung baru Pemkab Bojonegoro. (Rik/Kominfo)

[illegible]

“Open dokumen kontrak ini hasilnya langsung bisa di audit secara online oleh BPK dan di harapan bisa meyakinkan masyarakat dan menarik partisipasinya,” tandasnya. (Rik/Kominfo)

3. Bojonegoro jadi Inspirasi Pemerintahan Terbuka di Indonesia



Festival Open Government Partnership (OGP) Bojonegoro cukup menarik banyak partisipan untuk saling mengambil peran. Selain unsur pemerintah, ada LSM, pengusaha, akademisi termasuk puluhan jurnalis dari berbagai media. Mereka menjadi satu dalam acara festival yang dihelat mulai Rabu (19/10) di gedung baru Pemkab Bojonegoro lantai 1, 2, 4 dan 7 itu.

Festival ini di pilih sebagai ajang pembuktian bahwa Pemkab Bojonegoro perlahan telah bertransformasi dan lebur dengan masyarakat. Pemkab mengambil partisipasi dan kritik rakyat sebagai masukan untuk membangun lebih baik.

Menurut Suyoto, Bupati Bojonegoro dalam melaksanakan keterbukaan Pemerintahan, Pemkab Bojonegoro memilih untuk berkolaborasi dengan empat sekawan (pemerintah, bisnisan, akademisi dan NGO). "Karena dengan kolaborasi akan ada sinergi yang terbentuk dan akan menemukan solusi setiap permasalahan yang ada," katanya.

Dijelaskan, dalam pelaksanaannya partisipasi publik menjadi role utama untuk melakukan pencegahan konflik. "Bojonegoro memilih OGP sebagai langkah awal dalam melakukan pembangunan berkelanjutan kedepannya," ujar Kang Yoto, sapaan akrab Bupati Bojonegoro.

Sementara itu menurut Rizki Feriyanto, Deputy Bappenas, OGP merupakan proses demokrasi besar yang berdasarkan keinginan masyarakat. Dan Bojonegoro bisa membuktikan keberhasilannya melakukan keterbukaan, bahkan mendekati sempurna. "Sehingga metode yang dilakukan seperti Musrenbangdes agar bisa terus berlanjut dan bisa menjadi contoh untuk daerah lain," ungkapnya.

Selain itu, Rusnadi Pajang staf ahli Menteri Desa mengatakan bahwa metode pengelolaan dana Desa yang dilakukan Pemkab Bojonegoro bisa menjadi inspirasi lainnya. "Juga bisa meningkatkan untuk pengelolaan lebih baik dan transparan, sesuai dengan aturan yang telah di tentukan," jelasnya dalam diskusi panel festival OGP.

Adapun Yanuar Nugroho, staf Kepresidenan menambahkan bahwa keterbukaan yang dilakukan Bojonegoro patut di berikan apresiasi. "Sebab, Bojonegoro merupakan salah satu pelopor keterbukaan level subnational di Dunia," imbuhnya. (Rik/Kominfo)

Menegaskan Pentingnya Keterbukaan Pemerintah di Tingkat Daerah

4. Festival Open Government Partnership Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016

Bojonegoro, yang merupakan satu dari 15 pemerintah daerah percontohan dalam ajang “Open Government Partnership (OGP) Subnational Government Pilot Program” atau Percontohan Pemerintah Daerah Terbuka, hari ini menyelenggarakan kegiatan Festival Open Government Partnership (OGP) di Kantor Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari yaitu pada tanggal 19-20 Oktober 2016.

Menteri PAN-RB Asman Abnur, Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas Rizky Feriyanto, Deputy II Kantor Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho dan perwakilan dari beberapa pemerintah Kabupaten/Kota, hadir pada acara Festival Open Government Partnership (OGP) ini. Kedatangan para pejabat Negara dan perwakilan pemerintah Kabupaten/Kota ini di Bojonegoro, merupakan bentuk respon positif guna mendorong terselenggaranya transparansi di Kabupaten Bojonegoro.

Kegiatan ini merupakan inisiatif Pemkab Bojonegoro di dalam menegaskan komitmen keterbukaan di dalam tata kelola pemerintahan di Bojonegoro. Melalui program pameran, diskusi panel, dan berbagai perlombaan serta rangkaian acara pendamping lainnya, dipaparkan berbagai prestasi dan perencanaan pengimplementasian pemerintahan terbuka di Bojonegoro.

Menurut Kepala Dinas Kominfo Bojonegoro, Kusnandaka Tjatur, ada beberapa contoh praktik keterbukaan pemerintah di Bojonegoro yang hendak dipaparkan terutama di tingkat desa sebagai tingkatan pemerintahan paling kecil. Pertama, pengelolaan anggaran desa yang transparan dengan dipublikasikan di berbagai media, mulai dari baliho, poster, pamphlet, leaflet, papan informasi dan juga lewat website dan blog desa. Dua, proses akuntabilitas desa lewat proses seperti Musyawarah Perencanaan dan Pengembangan Desa (Musrenbangdes). Tiga, peran serta sekaligus pelibatan masyarakat atas perencanaan yang dilakukan Pemerintah Desa. Empat, munculnya cara-cara baru dan komunikasi aktif antara Pemerintah Desa dengan masyarakat, terutama dalam bidang Teknologi Informasi. “Kriteria ini, baku bagi semua pejabat di desa yang ada di Bojonegoro” ujarnya.

Di luar itu, lanjut Kusnandaka Tjatur, juga ada materi lain yang disampaikan. Yaitu publikasi anggaran bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), juga gambar-gambar serta aplikasi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Seperti aplikasi dengan nama SIAP LAPOR—yaitu sebuah Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat yang diinisiasi oleh pemerintah pusat dan telah digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam mengawal kinerja Pemerintahannya. “Laporan masyarakat terbukti bermanfaat bagi pemerintah dalam memecahkan masalah untuk merumuskan solusi terbaik ke depannya,” tandas Kusnandaka.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur dalam sambutannya bahkan mengatakan gembira dan terkejut dengan kemajuan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. “Saya minta kepada seluruh pemerintah daerah untuk dapat meniru Bojonegoro, karena seluruh sistem sudah dipersiapkan dengan baik dan matang sehingga mudah untuk direplikasi”, jelas Menteri Asman. “Dengan begitu saya yakin proses reformasi birokrasi dan pelayanan publik di daerah dapat lebih cepat dan efisien untuk diterapkan”, tambah Menteri Asman.

Bupati Bojonegoro Suyoto, mengatakan, Kabupaten Bojonegoro punya potensi alam baik. Dari daerah minyak dan gas, areal pertanian dengan sumber mata air dari Sungai Bengawan Solo dan bendungan, juga areal peternakan yang lapang, namun sayangnya belum teroptimalkan.

Karena itu menurut Suyoto, potensi alam dan potensi manusia Bojonegoro harus dipadukan dengan sistem pengelolaan yang kolaboratif dengan masyarakat dan secara akuntabel serta inovatif, maka

Bojonegoro akan jadi kabupaten gemah ripah loh jinawi. Untuk itu ke depannya, perangkat TI diproyeksikan untuk dioptimalkan di 430 desa/kelurahan yang ada di 28 kecamatan di Bojonegoro. “Kalau seluruh desa/kelurahan punya website, tentu memudahkan orang melihat potensi kabupaten ini,” imbuhnya.

Tentang Sekretariat Nasional Open Government Indonesia:

Sekretariat Nasional (Seknas) OGI merupakan lembaga yang dibentuk untuk memfasilitasi dan mendorong proses realisasi kebijakan untuk menciptakan pemerintah yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatoris. Seknas OGI diisi oleh sejumlah staf profesional dan dikoordinasikan bersama oleh Tim Inti OGI yang terdiri atas Kantor Staf Presiden, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Luar Negeri serta sejumlah unsur perwakilan masyarakat sipil.

5. Dinas Kominfo paparkan SIAP LAPOR dalam Forum Nasional Replikasi Inovasi Pelayanan Publik 2016 di Bandung Pada Tanggal 26 oktober sampai dengan 27 Oktober 2015



Bojonegoro – Hari ini (25/10) Pemkab Bojonegoro mendapatkan undangan untuk memaparkan inovasinya di hadapan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB) di Bandung. Bojonegoro dianggap berhasil mengelola aplikasi Layanan Pengaduan Online Rakyat (Lapor) dari pusat hingga ke tingkat desa.

“Yang kami bawa adalah Siap Lapor, inovasi pengelolaan aduan masyarakat,” ujar Kusnandaka Tjatur, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Bojonegoro.

Siap Lapor merupakan sebuah tata kelola atas pengaduan masyarakat di Bojonegoro yang mengintegrasikan input pengaduan dari berbagai saluran. Mulai dijalankan pada tahun 2016 ini, Siap Lapor yang kependekan dari Sistem Integrasi Aspirasi Pengaduan Lapor; dibuat untuk menjangkau respon pengaduan hingga ke tingkat desa.

“Praktiknya, selain admin utama di tingkat Kabupaten, seluruh SKPD juga menjadi admin berdasarkan disposisi pengaduan. Kalau yang ke tingkat desa, adalah tanggungjawab yang harus dijalankan oleh pihak Kecamatan,” tambahnya.

Tak hanya pasif menunggu aduan, dalam Siap Lapor ini admin utama juga melakukan input manual berdasarkan pemantauan. Baik itu melalui dialog interaktif, pemantauan sosial media, ataupun sms dan whatsapp yang masuk ke nomor pejabat.

Nantinya mekanisme ini bakal digunakan dan ditiru oleh seluruh pemerintahan se tingkat di Indonesia. (nutty/dinkominfo)

Bulan November 2016

Bojonegoro Siapkan Rencana-Aksi OGP 2017



Dengan di dampingi langsung tim dari Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Jakarta tim Open Government Indonesia (OGI) Pemkab Bojonegoro merumuskan rencana aksi Open Government Partnership (OGP) untuk tahun 2017. Dalam perumusan ini dihadiri oleh beberapa Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait seperti Dinas Kominfo, Bappeda, BPMPD, RSUD, Dinas PU, Ortala serta organisasi masyarakat Bojonegoro Institute (BI) dan Idfos.

“Untuk memaksimalkan perkembangan renaksi sebelumnya, maka dalam kesempatan ini dirumuskan program-program sesuai dengan tahapannya. Misalnya untuk Revolusi data, akan difokuskan pada data real time kemudian akan di lakukan verifikasi. Sehingga inputting data bisa dilakukan secara cepat dan tepat,” jelas Kepala Dinas Kominfo Bojonegoro, Kusnandaka Tjatur.

Selaku penanggungjawab, Kusnandaka juga menyampaikan bahwa perumusan renaksi kali ini akan dicukupi setiap tribulan. “Sehingga proses jalannya keterbukaan Pemerintah di Bojonegoro semakin jelas alur dan perkembangannya. Sehingga akan lebih mudah di evaluasi kedepannya,” tandasnya.

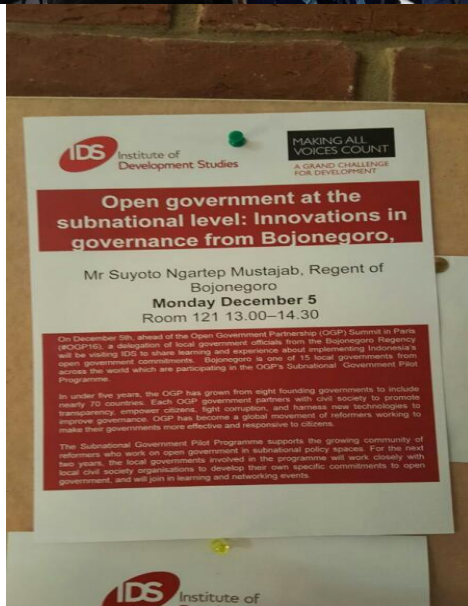
Beberapa yang menjadi fokus kegiatan OGP ini antara lain adalah Akuntabilitas Desa yang diharapkan segera menuntaskan transparansi melalui baliho, webdes dan setelah itu akan ada pendampingan pembuatan PPID Desa di 30 Desa.

Untuk Transparansi, partisipasi dan inovasi nantinya pengelolaan kekayaan dan anggaran daerah akan lebih transparan dengan memanfaatkan IT. Sementara untuk open dokumen kontrak akan dikawal secara langsung.

“Mulai dari proses pengadaan barang dan jasa, pengerjaan, penandatanganan sampai dengan pembayaran uang,” imbuhnya.(mcb)

Bulan Desember 2016

1. Bojonegoro menjadi insprator tunggal di Institute for Development Studies (IDS), University of Sussex, Inggris



pada tanggal 5 Desember 2016, Bupati Bojonegoro Suyoto menjadi pembicara tunggal pada Seminar yang bertajuk *'Open Government at the Subnational Level: Innovations in governance from Bojonegoro'* di Institute for Development Studies (IDS), University of Sussex, Inggris. Seminar tersebut dihadiri oleh staf pengajar, peneliti, dan mahasiswa IDS serta staf dan pimpinan NGO *Making All Voices Count* (MAVC) yang memusatkan studi dan aktivitasnya pada tata kelola pemerintahan yang baik, Indonesia, dan Bojonegoro. Seminar tersebut diselenggarakan sebelum pelaksanaan *Global Summit Meeting of the Open Government Partnership* (OGP) di Paris, Perancis, pada tanggal 7 Desember 2016 sampai 9 Desember 2016, Seminar tersebut terselenggara atas kerja sama dengan NGO MAVC yang juga beroperasi di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara prioritas yang menjadi perhatian MAVC selain Filipina, Kenya, Afrika Selatan, Ghana dan Tanzania dikarenakan perkembangan demokrasi yang dinilai cukup positif di negara-negara tersebut. Sedangkan 15 daerah yang menjadi *pilot project OGP* adalah Austin (AS), Bojonegoro (Indonesia), Buenos Aires (Argentina), Elgeyo Marakwet (Kenya), Jalisco (Meksiko), Kigoma (Tanzania), La Libertad (Peru), Madrid (Spanyol), Ontario (Kanada), Paris (Perancis), Sao Paulo (Brazil), Skotlandia (Inggris), Sekondi-Takoradi (Ghana), Seoul (Korea Selatan), Tbilisi (Georgia).
(berbagai sumber)

2. Bojonegoro Ikut Deklarasi Pemerintah Terbuka di Paris



Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, mewakili Indonesia, mengikuti deklarasi Konferensi Tingkat Tinggi Open Government Partnership (KTT-OGP) atau Pemerintah Terbuka di Paris, Prancis, pada 7-9 Desember 2016. Di acara yang dihadiri 75 negara itu, Bojonegoro juga dipercaya menjadi pemimpin diskusi panel terkait dengan prinsip pemerintah terbuka.

Pembukaan KTT-OGP menjadi acara puncak tahunan penggiat pemerintah terbuka di seluruh dunia. Sekitar 3.000 peserta dari 75 negara hadir. Mereka dari pelbagai institusi, baik dari pemerintah dan organisasi masyarakat sipil, berkumpul di Kota Paris.

Mereka juga berbagi pengalaman dan inspirasi terkait dengan upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan, responsif, dan akuntabel. "Sangat menarik," ujar Bupati Bojonegoro Suyoto kepada Tempo lewat telepon selularnya, Sabtu, 10 Desember 2016.

Di sela acara itu, juga digelar penandatanganan Deklarasi Pemerintah Terbuka. Penandatanganan deklarasi di antaranya diikuti Deputy Mayor Paris, Gubernur Peru, Luis Valdes, dan juga tim pemerintah terbuka dari Bojonegoro.

Suyoto menyebutkan, pada pidato pembukaan sebagai tuan rumah, Presiden Prancis Francois Hollande, menekankan pentingnya terus mendorong nilai-nilai keterbukaan dan demokrasi di tengah tren geopolitik. Saat ini muncul ancaman kemunduran menjadi penghalang untuk proses demokratisasi.

Di acara KTT-OGP, lanjut Suyoto, delegasi Indonesia mendapatkan apresiasi dari komunitas internasional dalam implementasi pemerintah terbuka. Kabupaten Bojonegoro terpilih menjadi salah satu dari 15 daerah percontohan dunia untuk praktek pemerintah terbuka di tingkat daerah. Dengan demikian posisi Bojonegoro disejajarkan dengan kota-kota besar lain di dunia. Seperti Paris di Prancis, Madrid di Spanyol, dan Seoul di Korea Selatan.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Bojonegoro Kusnandaka Tjatur mengatakan Indonesia dipercaya memimpin diskusi panel dengan tema pentingnya tujuan dan target pembangunan berkelanjutan. "Indonesia menjadi pemimpin diskusi panel," ujarnya pada Tempo lewat saluran telepon, Sabtu, 10 Desember.

Di acara diskusi itu, hadir Menteri Administrasi Publik dari Meksiko, Menteri Kehakiman dari Georgia, Deputy Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho, dan Bupati Bojonegoro Suyoto. Para peserta diskusi, baik dari wakil pemerintah maupun dari masyarakat sipil, sepakat untuk mengedepankan tata kelola pemerintah terbuka. "Tentu ini hal menarik," ujar Kusnandaka Tjatur, yang hadir di acara itu.

Program pemerintahan terbuka bergulir setelah Kabupaten Bojonegoro ditetapkan sebagai percontohan OGP, menyingkirkan Provinsi DKI Jakarta dan Kota Banda Aceh, yang juga masuk nominasi awal April 2016. Bojonegoro jadi percontohan pemerintah daerah pertama di Asia yang sejajar dengan 15 kota besar di dunia yang ikut kontes di program ini, bersama Kota Seoul, Korea Selatan; dan Kota Tbilisi, Georgia.

Pada kesempatan ini Bojonegoro mewakili Indonesia ditunjuk dan dipercayai dan ditunjuk untuk memimpin diskusi panel terbatas terkait pentingnya prinsip *good and open governance* dalam mencapai tujuan dan target dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan /Sustainable Development Goals. Menurut Bapak Bupati Bojonegoro, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terpilih atas komitmennya untuk melakukan transformasi keterbukaan sejak tahun 2008. Hal ini terbukti membantu mendorong angka pertumbuhan ekonomi Bojonegoro meningkat dua kali lipat dan penurunan angka kemiskinan serta pengangguran sebesar dua kali lipat pada tahun 2015. Open Government Partnership (OGP) merupakan sebuah inisiatif internasional yang bertujuan mendorong prinsip-prinsip pemerintahan yang berlandaskan transparansi, akuntabilitas, penguatan partisipasi masyarakat, dan inovasi pemanfaatan teknologi demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih responsif, bersih, efektif, dan efisien;

Source : Tempo.co

3. Bojonegoro Tarik Perhatian Masyarakat Dunia Di Inggris



Foto : ils/istimewa

mufid | Rabu , 07 Desember 2016 - 08:29 WIB

Bojonegoro Perhatian Masyarakat Dunia London Inggris Dialog ekonomi

Publicapos.com - Bupati Bojonegoro Suyoto Ngartep Mustajab memaparkan program reformasi birokrasi, pemberdayaan masyarakat, tata kelola pemerintahan baik dan pembangunan selama sembilan tahun kepemimpinannya," kata Sekretaris Pertama Fungsi Politik KBRI London Gita Loka Murti kepada Antara London, Rabu. Ia menjadi pembicara tunggal pada seminar bertajuk "Open Government at the Subnational Level: Innovations in governance from Bojonegoro" di Institute for Development Studies (IDS), University of Sussex, Inggris, kata Gita. Seminar itu diadakan sebelum pelaksanaan Global Summit Meeting of the Open Government Partnership (OGP) di Paris, Prancis, 7-9 Desember 2016, tempat Bojonegoro menjadi salah satu dari 15 daerah terpilih dari seluruh dunia sebagai tempat program percontohan OGP di tingkat sub-nasional. Dalam seminar itu, Kang Yoto, sapaan akrabnya, mengatakan antara lain mengembangkan program aplikasi berbasis Internet dan telepon selular bernama LAPOR untuk menampung aspirasi warga Bojonegoro agar dapat ditanggapi cepat dan tepat oleh Pemerintah.

Selain LAPOR, Pemda Bojonegoro juga membangun Dialog Jumatan, dengan warga berkumpul di alun-alun setiap Jumat untuk menyuarakan aspirasinya.

Ia mengatakan sering mengadakan pelatihan bagi pegawai Pemda, yang berjumlah lebih kurang 12.000 orang. Dengan menyadari bahwa prasarana baik adalah unsur penting penunjang pembangunan ekonomi, maka seiring dengan program nasional, Pemda Bojonegoro melakukan perbaikan mutu prasarana, seperti, pembangunan jalan dan penghijauan daerah aliran sungai untuk mencegah banjir. Kini, selain menjadi wakil Indonesia pada proyek percontohan OGP, Bojonegoro juga menjadi daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia (19.47%), penurunan tingkat kemiskinan dari 16.6% menjadi 13,98%, dan peningkatan tingkat pemerataan ekonomi, yang ditandai dengan penurunan Ratio Gini daerah tersebut.

Seminar itu dihadiri pengajar, peneliti dan mahasiswa IDS serta staf dan pimpinan NGO Making All Voices Count (MAVC), yang memusatkan studi dan aktivitasnya pada tata kelola pemerintahan baik Indonesia dan Bojonegoro. Pada kesempatan tersebut terungkap bahwa terdapat tujuh penelitian dengan sasaran kajian Bojonegoro. Pengajar IDS menyatakan akan memberikan hasil penelitian tersebut kepada Bupati Bojonegoro dan jajarannya untuk mendapatkan tanggapan. Seminar itu diadakan bekerjasama dengan LSM MAVC, yang juga bergerak di Indonesia, yang menjadi salah satu negara prioritas perhatian MAVC selain Filipina, Kenya, Afrika Selatan, Ghana dan Tanzania karena perkembangan民主nya.

Sejumlah 15 tempat menjadi proyek percontohan OGP, yakni Austin (AS), Bojonegoro (Indonesia), Buenos Aires (Argentina), Elgeyo Marakwet (Kenya), Jalisco (Meksiko), Kigoma (Tanzania), La Libertad (Peru), Madrid (Spanyol), Ontario (Kanada), Paris (Perancis), Sao Paulo (Brazil), Skotlandia (Inggris), Sekondi-Takoradi (Ghana), Seoul (Korea Selatan), Tbilisi (Georgia).

2. PPID Award 2016, Bojonegoro Raih Penghargaan Sistem Layanan Informasi Terbaik



Kabupaten Bojonegoro kembali menuai prestasi di sektor keterbukaan informasi. Kali ini, Bojonegoro mendapat gelar terbaik dalam lomba Sistem Layanan Informasi tingkat Provinsi Jawa Timur. Penghargaan itu diterima Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Bojonegoro, Kusnandaka Tjatur P di Surabaya.

“Penghargaan ini buah kerja keras, kerja cerdas dan kerja tuntas. Semoga ini menjadi motivasi bagi aparatur pemerintah untuk lebih inovasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” kata Kusnandaka. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf mengatakan, di era saat ini, pemerintah ada dua tuntutan, yakni good goverment (pemerintahan yang baik) dan apen goverment (pemerintahan yang terbuka). Untuk itu, lanjut ia, pemerintah harus bertindak profesional, transparan dan mengikutsertakan masyarakat dalam pelayanan.

“Ini suatu kebutuhan yang harus kita realisasikan. Orang butuh segera dilayani dengan kepentingan macam-macam, tapi inilah amanat Undang-undang yang harus kita laksanakan,” tegas pria yang akrab disapa Gus Ipul ini.

Dalam ajang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) award 2016 tersebut, Bojonegoro meraih penghargaan dalam beberapa kategori sekaligus.

Dari lima kategori yang dilombakan, Bojonegoro meraih penghargaan Sistem Layanan Informasi terbaik kabupaten / kota Se Jatim Kategori A, bersama Kabupaten Blitar. Sedangkan kategori B diraih Kabupaten Banyuwangi, Pamekasan, Blitar, dan Kota Surabaya. Kemudian di kategori website terinformatif kabupaten/kota Se Jawa Timur, Bojonegoro masuk nominator bersama Kabupaten Banyuwangi, dan Blitar. Sedangkan untuk Kategori website terinformatif SKP masuk nominator adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan Provinsi Jatim, serta Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Saiful Anwar Malang. Selain itu, Bojonegoro masuk dalam nominator kategori Meja Layanan Terbaik bersama Kabupaten Sampang dan Blitar.

Tidak hanya itu, di kategori kepatuhan melaporkan layanan informasi publik Bojonegoro juga masuk nominator bersama Kota Blitar dan Kabupaten Blitar. Kemudian kategori kepatuhan melaporkan layanan informasi publik Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bojonegoro mendapat nominator bersama KPU Jember dan Tulungagung.

Juga Bojonegoro menjadi nominator kategori apresiasi terhadap inisiatif penggerak keterbukaan informasi di pemerintahan desa bersama Kabupaten Trenggalek, Blitar dan Magetan.(dwi/mcb)